

**Judul** : **Kajian Aktivitas Ekonomi Pelaku Sektor Informal Perkotaan Di Provinsi Riau (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten/Kota)**

**Tahun** : **2012**

**Penulis** : **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau**

**Kategori** : **Ekonomi dan Pembangunan Daerah**

Meningkatnya arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja ke kota-kota besar di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat sektor informal, terutama kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima (PKL). Sektor ini muncul sebagai wadah alternatif bagi tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal akibat keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan. Meskipun sering kali tidak tercatat secara resmi, sektor informal memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, menekan angka pengangguran, serta menjaga ketahanan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama di masa krisis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pedagang kaki lima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, menilai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta merumuskan model pengembangan yang berkelanjutan. Kajian menggunakan pendekatan policy research dengan metode studi kasus dan survei lapangan terhadap 60 responden PKL di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Siak. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari publikasi resmi dan dokumen kebijakan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di Riau merupakan pendatang dengan tingkat pendidikan rendah, bekerja secara mandiri dengan modal terbatas, serta tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Rata-rata pendapatan bersih berkisar Rp600.000–Rp1.000.000 per bulan, menunjukkan posisi ekonomi menengah-rendah. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lokasi usaha yang legal, minimnya fasilitas dasar, sulitnya akses permodalan, dan lemahnya dukungan pembinaan pemerintah daerah. Meskipun demikian, keberadaan PKL terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan pengangguran, penyediaan barang dan jasa murah bagi masyarakat, serta perputaran ekonomi lokal.

Secara umum, kinerja PKL dipengaruhi oleh tiga faktor dominan: tempat usaha, status lokasi, dan tingkat pendidikan. Dukungan pemerintah daerah masih minim dan cenderung bersifat represif dibandingkan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model pengembangan PKL berbasis pemberdayaan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat. Model ini mencakup: (1) penataan lokasi usaha yang legal dan higienis, (2) pembentukan koperasi PKL, (3) akses

pembiayaan mikro tanpa agunan, (4) pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, serta (5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan pendekatan kebijakan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, pedagang kaki lima dapat bertransformasi dari pelaku ekonomi informal menjadi usaha kecil yang produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota yang tangguh, manusiawi, dan berkeadilan.